



pemerintah di Padang. M. Natsir kemudian melanjutkan studinya di Mulo Padang dan melanjutkan ke AMS A 2 (SMA Jurusan sastra Barat) di Bandung. Walaupun mendapatkan tawaran beasiswa dari Mulo dan AMS untuk belajar di Fakultas Hukum di Jakarta atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam, ia tidak melanjutkan studinya, dan lebih tertarik pada perjuangan Islam.

Pendidikan agamanya diperoleh dari pendidikan orangtuanya, kemudian ia masuk sekolah diniyah di Solok pada sore hari, dan belajar mengaji al-Qur'an pada malam harinya di surau. Pengetahuan agama M. Natsir semakin mendalam ketika ia berguru kepada Ustadz Abbas Hasan, seorang tokoh Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung. Kepribadian A. Hasan yang hidup sederhana dan rapi dalam bekerja, alim, tajam argumentasinya, dan berani mengemukakan pendapat tampaknya cukup berpengaruh terhadap kepribadian M. Natsir.

M. Natsir banyak belajar mengenai teologi (tauhid), ilmu fiqih (syari'ah), tafsir hadits, filsafat, sejarah, kebudayaan, dan politik Islam. Di samping itu, ia juga banyak belajar dari tokoh-tokoh Islam terkemuka pada waktu itu, seperti H. Agus Salim, Syekh Ahmad Soorkati, HOS Cokroaminoto dan A.M. Sangaji. Pengalaman ini semua memperkokoh keyakinan M. Natsir untuk berjuang dalam menegakkan agama Islam.²

Kepribadian yang sederhana dari guru-gurunya, kemudian ia ikuti dalam kehidupan kesehariannya. Ini dapat dilihat saat menjabat sebagai menteri Penerangan dan ketua Partai Masyumi. Demi perjuangannya, ia tidak sempat memikirkan untuk memiliki rumah sendiri, bahkan ketika mobilnya rusak ia *service* sendiri.³

M. Natsir juga dikenal sebagai seorang *mujahid dakwah*, pemimpin sejati, pendidik, dan juga pejuang kemanusiaan.⁴ Keprihatinan dakwahnya bukan saja di dirasakan dan dihargai oleh bangsa Indonesia dan umat Islam yang tersebar di seluruh Nusantara, tetapi dicintai dan dihormati umat Islam di seluruh dunia.⁵

PERJUANGAN POLITIK

Menurut Chabib Chirzin, M. Natsir adalah seorang demokrat sejati.⁶ Ia memulai karir politiknya dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938. Berkat perjuangannya, pada tahun 1940-1942, ia diangkat sebagai ketua partai. Ia juga diangkat sebagai abdi negara oleh pemerintah sebagai kepala pendidikan kodya Bandung sampai tahun 1945, sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Puncak karier politiknya adalah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), ketua Partai Masyumi, Menteri Penerangan, dan juga pernah menjadi Perdana Menteri RI pada masa pemerintahan Soekarno.

Dalam karir politiknya, M. Natsir pernah membuat langkah-langkah strategis, khususnya dalam mengangkat mosi pada sidang Perlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Ini dikenal dengan mosi integral Natsir. Mosi ini adalah menyatukan Republik Indonesia yang telah terpecah menjadi 17 negara bagian, ini sebagai akibat dari Konferensi Meja Bundar (KMB), kemudian kembali kepada pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena mosi inilah, kemudian ia dapat tampil pada puncak pemerintahan.

Pada tahun 1958, M. Natsir pernah membentuk sebuah pemerintahan tandingan yang dikenal dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan tandingan ini dimunculkan sebagai reaksi atas kebijakan Soekarno yang telah menyeleweng dari UUD 1945.⁷ Akhirnya, pada tahun 1960 ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada tahun yang sama, PRRI yang didominasi oleh anggota Masyumi dibubarkan. Pada tahun 1966, M. Natsir dibebaskan dari penjara setelah pemerintahan dipegang oleh Orde Baru. Sejak itulah, perjuangan politik M. Natsir berakhir.

GAGASAN PEMIKIRAN DAN GERAKAN

Islam dan Negara

Dasar Negara

Berbicara tentang hubungan Islam dan negara, M. Natsir memiliki pandangan yang sangat moderat. Sebuah negara akan dikatakan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut "negara Islam", tetapi negara itu disusun sesuai dengan



ajaran-ajaran Islam, baik dalam teori maupun praktiknya. Dasar-dasar negara ini dapat dirumuskan dalam klausul-klausul yang bersifat umum, sepanjang mencerminkan kehendak-kehendak Islam. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang jumlah pemeluk Islamnya mayoritas, dan Islam memiliki ajaran yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat sekaligus Islam menjamin keragaman hidup antargolongan dalam negara dengan penuh toleransi.⁸ Oleh karena itu, Islam harus menyatu dengan negara.

Menurut M. Natsir, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia mengatakan bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral dari risalah Islam. Dinyatakan pula bahwa kaum muslimin mempunyai falsafah hidup atau ideologi sebagaimana agama-agama yang lainnya. Ia mengutip sebuah ayat al-Qur'an, yang artinya: *"Tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku"*. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam inilah, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanya ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.⁹

Untuk mencapai predikat hamba Allah tersebut, Allah memberikan aturan kepada manusia tentang bagaimana berhubungan dengan Allah (khalik) dan berhubungan dengan sesama manusia (makhluk). Hubungan yang kedua inilah, yang dinamakan dengan urusan kenegaraan.

Munculnya kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan berdirinya negara Islam, yaitu negara yang menyatukan agama dengan politik, sebenarnya karena ketidakpahaman dan kekeliruan mereka dalam memahami gambaran pemerintahan Islam itu sendiri. Kalau agama dan negara ini bersatu, seakan-akan negara bagaikan kerajaan yang rajanya hanya duduk di singgasana dan dikelilingi oleh dayang-dayangnya. Kemudian, tunjuk-sana-tunjuk-sini sesuai dengan kemauannya. Gambaran seperti inilah yang terdapat dalam pandangan Soekarno pada waktu itu.

Jika ingin memahami hubungan agama dan negara secara jernih, hendaklah menghapuskan terlebih dahulu gambaran yang keliru tentang negara Islam. Coba tengok sejarah Turki, pada masa pemerintahan para sultan dan kekhilifahan Usmaniyah terakhir, bukanlah negara atau pemerintahan Islam, sebab pemimpinya menindas dan membiarkan masyarakatnya berada pada kebodohan. Mereka memakai Islam dan segala bentuk ibadah-ibadahnya hanya sebagai tameng belaka.¹⁰

Eksistensi Negara

Menurut M. Natsir, negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Sebagai alat, eksistensi negara itu bersifat mutlak. Dengan begitu, ajaran Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Negara bukanlah menjadi tujuan akhir, tetapi hanyalah alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Di antara aturan-aturan Islam tersebut, M. Natsir menyebutkan bahwa kewajiban berzakat, pemberantasan perzinahan, dan lain-lainnya tidak akan memiliki arti apa-apa manakala tidak ada negara. Jadi, eksistensi negara merupakan keharusan di dunia ini, bahkan di zaman apapun.¹¹

Politik sebagai Media Dakwah

Untuk kasus Indonesia, adanya modernisasi politik Islam adalah suatu keharusan. Menurut M. Natsir, modernisasi politik Islam merupakan sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial, dan politik Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia. Dalam terma politik inilah, ia mewajibkan setiap umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana dakwah Islam.

Politik sebagai sarana dakwah, berarti aturan-aturan main politik itu harus paralel dengan aturan main dakwah. Hal ini juga berarti bahwa politik tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkirbalikan kebenaran, dan mengelabui masyarakat. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta keberanian untuk menyatakan yang benar itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil, harus menjadi ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah.¹²



Dengan memiliki ciri- ciri di atas, politik baru akan fungsional terhadap tujuan dakwah. Sebaliknya, jika aturan main politik tidak sejalan dengan aturan main dakwah, maka dapat diperkirakan bahwa politik yang semacam itu akan disfungsi terhadap dakwah.³

Politik yang dijalankan oleh seorang muslim, yang berfungsi sebagai sarana dakwah, bukanlah politik yang sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen terhadap Allah. Dalam hal ini, politik bukan menjadi tujuan utama untuk mencari kekuasaan demi kekuasaan atau kepentingan demi kepentingan belaka. Kekuasaan, pengaruh, kepentingan, dan posisi politik, hanyalah menjadi sarana atau tujuan antara untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu sebuah pengabdian kepada Allah.

Islam dan Pancasila

Pancasila adalah landasan dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan; dan
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dilihat dari sila-sila di atas, secara isi terdapat kesesuaian antara Islam dan Pancasila. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa pancasila adalah Islam atau Islam adalah Pancasila. Menurut M. Natsir, Islam lebih luas daripada lima sila di dalam Pancasila. Lima sila itu hanyalah menggambarkan sebagian dari ajaran Islam.⁴

Sangatlah keliru, jika ada kalangan yang mempertentangkan antara Islam dan pancasila karena memang tidak ada yang perlu dipertentangkan di antara keduanya. Justru sila-sila yang terdapat dalam pancasila adalah di antara tujuan-tujuan yang ada dalam ajaran Islam. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pancaran tauhid. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” merupakan salah satu unsur utama dari nilai-nilai keadilan masyarakat dalam Islam. Sila “Persatuan” merupakan satu sendi ajaran Islam.⁵ Sila “Kerakyatan” dilukiskan dalam musyawarah di dalam al-Qur’an, dan Sila “Keadilan Sosial” menjadi sasaran pembentukan masyarakat *marhamah* menurut Islam, yang harus dipraktikkan dengan perasaan kasih dan sayang.

Gerakan Dakwah

Telah diuraikan di atas bahwa perjuangan politik M. Natsir berakhir pada tahun 1960, setelah ia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Baru setelah runtuhnya Orde Lama dan digantikan Orde Baru, pada tahun 1966, M. Natsir dibebaskan oleh Soeharto. Mulai saat itulah M. Natsir mengubah gerakannya dari gerakan politik kepada gerakan dakwah.

Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Dakwah adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam.⁶ Dakwah juga dapat diartikan sebagai aktivitas mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran Islam dengan melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, untuk dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁷ Dari pengertian di atas, secara substansial, dakwah dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dalam bentuk *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁸

Dakwah ini merupakan kegiatan tertua sekaligus menjadi sebab terbentuknya komunitas dan masyarakat, serta peradaban manusia yang mengantarkan kepada cita-cita ideal dakwah, yaitu terwujudnya *khairu ummah*. Sebab itulah, menurut M. Natsir, dakwah harus berpijak pada rasa cinta dan persaudaraan. Lebih lanjut, M. Natsir menegaskan bahwa dakwah memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu:



1. Memanggil kita kepada syariat untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup, baik perseorangan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Memanggil kita pada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian, dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai *syuhada alannas*, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia; dan
3. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu menyembah Allah.¹⁹

Dengan demikian dakwah mengandung konsekuensi-konsekuensi dalam penerapannya yaitu:

1. Dakwah hendaklah bersih dari rasa benci dan permusuhan;
2. Tutur kata para pelaku dakwah harus bersendikan pada *akhlaqul karimah*;
3. Menjauhi sifat suka menuding dan saling mengkafirkan, apalagi terkesan membuka aib sesama manusia; dan
4. Menciptakan kondisi yang bersahabat dan akrab dengan para objek dakwah agar mereka memiliki rasa *melu handarbeni*, ikut merasa bertanggung jawab untuk meneruskan pesan-pesan tersebut kepada teman-temannya yang lain sebagai kelanjutan dari informasi dakwah yang diterimanya.²⁰

Untuk merealisasikan terwujudnya cita-cita ideal tersebut, dakwah harus dilakukan dengan strategi yang benar, disalurkan melalui media yang tepat, dan menggunakan metode yang sesuai. Ini artinya bahwa dakwah harus tampil secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual artinya dakwah harus mampu memecahkan persoalan kekinian yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Faktual artinya kongkrit dan nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kontekstual artinya relevan dan menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.²¹ Oleh karena itulah, memilih metode yang tepat menjadi bagian dari strategi dakwah.

Untuk menggapai cita-cita ideal dakwah, selain strategi yang tepat, diperlukan juga lembaga yang memotori kegiatan dakwah tersebut. Oleh karena itu, kemudian M. Natsir membuat sebuah lembaga dakwah yang diberi nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

MENDIRIKAN LEMBAGA DAKWAH DDII

Sebagai mantan politisi dan mantan pejabat negara, M. Natsir telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali ulama-ulama di Jakarta. Pada 26 Februari 1967, beserta ulama-ulama, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh agama, khususnya mantan aktivis Masyumi, membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia. Dari pembicaraan tersebut, disepakati bahwa untuk memperjuangkan Islam diperlukan lembaga yang mewadahnya. Pada 6 Mei 1967 dibentuklah lembaga dakwah yang diberi nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong, memperbaiki, dan mengembangkan dakwah Islamiah di Indonesia dengan dasar taqwa dan keridlaan Allah SWT.²²

Sebagaimana organisasi yang lain, DDII memiliki cabang di berbagai daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. DDII sendiri memiliki kantor pusat di Jl. Kramat Raya No. 5 Jakarta dan memiliki masjid yang diberi nama al-Furqan.

Melalui DDII inilah, M. Natsir mengembangkan dakwah Islamiah dengan tiga pilar penting, yaitu masjid, pondok pesantren, dan kampus. *Pertama*, Masjid adalah lembaga risalah, tempat mencetak umat yang beriman, beribadah, tempat menghubungkan jiwa manusia dengan Khaliknya, tempat mencetak umat yang beramal shaleh dalam kehidupan masyarakat dan tempat mencetak umat yang berakhlaqul karimah. Dari masjid inilah diharapkan akan lahir jamaah yang kuat dan solid, bukan hanya dalam bidang aqidah dan ibadah, tetapi juga muamalah. *Kedua*, pondok pesantren, dari pondok pesantren ini diharapkan akan lahir ulama, kiai, dan ustadz yang memiliki komitmen dan semangat yang kuat mendakwahkan Islam ke seluruh tanah air. *Ketiga*, kampus, dari kampus inilah diharapkan akan lahir cendekiawan dan pemimpin diberbagai lapangan kehidupan.

Perpaduan ketiga pilar dakwah ini seharusnya bukan hanya perpaduan fisik, tetapi juga persepsi, pemikiran, dan amaliyah. Dengan kata lain, kaum cendekiawan dan civitas akademika di kampus harus memahami pesantren dan masjid.



Kaum santri juga harus memahami kampus dan masjid. Betapa besar kekuatan yang dapat dibangun, jika kekuatan pesantren dan perguruan tinggi bertemu dalam masjid. Jika kekuatan ini bersatu, niscaya akan menjadi modal besar bagi pembinaan umat maupun pembangunan bangsa dan negara.

Sebagai ketua DDII, M. Natsir juga mengembangkan dakwah dengan menyediakan tenaga khatib dan mubaligh di sejumlah masjid di Jakarta. Para khatib dan mubaligh ini sebelum diterjunkan dan diberikan arahan agar ketika menyampaikan ajaran Islam hanya berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits saja tanpa terikat dan taklid terhadap mazhab tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ajaran-ajaran yang menyimpang agar umat yang menjadi sasaran dakwah tidak tersesat.

Selain menyediakan khatib dan mubaligh, DDII juga mengelola penerbitan, percetakan, toko buku Media Dakwah, dan lembaga pendidikan serta menerbitkan majalah Islam seperti: Buletin Dakwah, Majalah Serial Khutbah Jum'at, Suara Masjid, Serial Media Dakwah, dan majalah anak-anak sahabat. Buku-buku Islam juga diterbitkan seperti buku-buku karangan M. Natsir atau buku-buku karangan anggota DDII yang lainnya, baik yang dikarang sendiri maupun terjemahan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), DDII kemudian merekomendasikan kepada siswa-siswi atau santrinya untuk melanjutkan pendidikan, khususnya ke Timur Tengah. Sebagian dari mereka diberikan beasiswa dari DDII dan sebagian lagi mendapatkan beasiswa dari negara-negara di Timur Tengah melalui DDII.²³

PENUTUP

M. Natsir adalah sosok negarawan, pemikir modernis, dan sekaligus mujahid dakwah. Gagasannya yang terkenal adalah mengenai Islam dan negara (demokrasi), Islam dan Pancasila, serta gagasannya tentang dakwah. Gagasan M. Natsir mengenai Islam dan Negara dan Islam dan Politik ini dapat dikategorikan sebagai pandangan yang moderat. Dalam hal ini, ia tidak mengharuskan segala sesuatu kepada tradisi sejarah Islam yang pernah ada. Misalnya, berkaitan dengan kepala negara, ia amat luwes, tidak mengharuskan khalifah, presiden atau *amirul mu'minin*. Baginya, yang terpenting adalah berjalannya ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat.

Sepanjang hidupnya, selama 84 tahun, M. Natsir menjadikan dakwah sebagai perjuangan dan tidak pernah surut dari medan dakwah, bahkan sampai ajal menjemputnya. Karena itulah, ia dapat dikatakan sebagai maestro dan arsitek dakwah yang sulit dicari generasi penerusnya.

ENDNOTE

¹ Didin Saefudin, *Pemikiran Modern dan Post Modern Islam* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2003), hal. 209.

² Amin Rais, *M. Natsir the Second Grand Old Man dalam Pak Natsir 80 Tahun* (Jakarta: Media Dakwah, 1988), hal. 75.

³ Didin Saefudin, *Pemikiran*, hal. 212.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Penentangannya terhadap Soekarno, karena Soekarno telah berubah menjadi pemimpin yang sangat otoriter dan menggenggam kekuasaan di tangan sendiri dengan bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai lain yang menuruti kemauan Soekarno. Bukan hanya Natsir, bahkan Hatta sendiri meletakkan jabatannya sebagai usaha mengembalikan Soekarno ke jalur yang benar. Tetapi, hal itu tidak menjadikan Soekarno tersadar, bahkan malah menjadi lebih leluasa. Baca dalam http://shofwankarim.multiply.com/journal/item/49_13/11/2008.

⁷ Didin, *Pemikiran*, hal. 214.

⁸ Semua kegiatan hamba Allah, baik yang berupa ibadah maupun muamalah, semua itu dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah SWT dengan niat (motif) mencari keridlaan-Nya semata-mata. Ini artinya menyembah Allah sebagai tujuan hidup. Baca Mohammad Natsir, *Fiqhud Da'wah* (Jakarta: Media Dakwah, 2000), hal. 25.

⁹ Baca dalam pemikiran M. Natsir tentang *Agama dan Negara* pada http://baitulmaalhidayatullah.com/content/view/117/97/08_Juli_2008.

¹⁰ http://baitulmaalhidayatullah.com/content/view/117/97/08_Juli_2008.

¹¹ Abdul Munir Mulkan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir* (Yogyakarta: Sippres, 1996), hal. 193.



¹² Politik sebagai alat dakwah harus dapat menunjang rekonstruksi masyarakat berdasarkan Islam. Rekonstruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam segala bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, iptek dan juga politik. Pengelola tugas-tugas kenegaraan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif dan juga masyarakat luas harus bersendikan pada tauhid dan harus diwamai dengan spirit dakwah Ilallah.

¹³ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 136.

¹⁴ Baca legalitas Syariat Islam dalam <http://blogislami.dagdigdug.com/about/ui/2008>.

¹⁵ Ahmad Ghulusy dalam H. Munzier Suparta dan Harjani Hefni, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 155. Dakwah juga diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana, dalam wujud sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan baik secara langsung atau tidak langsung yang ditujukan kepada orang per orang, masyarakat maupun golongan supaya tergugah jiwanya, terpenggil hatinya kepada ajaran Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Syamsuri Siddiq, *Dakwah dan Teknik Berkhobah* (Bandung: Alma'arif, 1993), hal. 8. Dakwah juga diartikan sebagai perintah menyeru ke jalan Tuhan dengan cara hikmah, pelajaran yang baik serta berdebat dengan cara yang baik pula. Baca Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1983), hal. 19.

¹⁶ Masdar Helmy, *Dakwah Islam dalam Alam Pembangunan* (Semarang: Toha putra, 1973), hal. 31.

¹⁷ Dalam al-Qur'an Surat al-Imran: 104, dijelaskan dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baca Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 1989) Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik pul. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa-siapa yang mendapat petunjuk. Baca *ibid.*, hal. 419.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Didin Saefudin, *Pemikiran*, hal. 220.

²⁰ Munzier Suparta dan Haryani Hefni, *Metode Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. Xiii.

²¹ Organisasi ini dalam menjalankan tugasnya banyak berhubungan dengan organisasi Islam internasional seperti Al Alam Al Islami yang berpusat di Mekah. Kemudian Muktamar Alam Islam (World Muslim Congress) yang berpusat di karachiserta Dewan Masjid Sedunia (al-Majlis al-A'la al-Alami Li al-Majid) yang berpusat di Mekah. Baca Aba-Far, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, TT), hal. 308.

²² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Depag. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Helmy, Masdar. 1972. *Dakwah Islam dalam Alam Pembangunan*. Semarang: Toha Putra.
- Far-Aba. TT. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: Sippress.
- Natsir, Mohammad. 2000. *Fiqhud Da'wah*. Jakarta: Media Dakwah.
- Rais, Amin, M. 1988. *Natsir the Second Grand Old Man dalam Pak Natsir 80 tahun*. Jakarta: Media Dakwah.
- Saefudin, Didin. 2003. *Pemikiran Modern dan Post Modern Islam*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Suparta, Munzier dan Hefni, Harjani. 2003. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- <http://shofwankarim.multiply.com/journal/item/49> 13/11/2008.
- <http://blogislami.dagdigdug.com/about/ui/2008>.